

PENDIDIKAN REKONSTRUKSIONISME SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS REFORMASI KURIKULUM DI ERA GLOBALISASI

Khaafidlotun Nisa¹, Selsa Yulianingsih², Nunung Asni³, Muhlisin⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

[1khaafidlotun.nisa25015@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:khaafidlotun.nisa25015@mhs.uingusdur.ac.id),

[2selsa.yulianingsih25013@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:selsa.yulianingsih25013@mhs.uingusdur.ac.id),

[3nunung.asni25012@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:nunung.asni25012@mhs.uingusdur.ac.id),

[4muhlisin@uingusdur.ac.id](mailto:muhlisin@uingusdur.ac.id)

ABSTRACT

Curriculum reform in the globalization era requires a philosophical foundation capable of responding to social dynamics, technological advancement, and moral challenges holistically. Reconstructionism, as a philosophy of education that positions education as an agent of social change, offers a relevant conceptual framework to address these needs. This study aims to analyze the concept of reconstructionism as a philosophical foundation for curriculum reform in Indonesia and its implications for national curriculum design and development. The method used is library research with a descriptive-qualitative approach through thematic analysis of 22 academic literature sources and 3 national curriculum policy documents from the period 2018–2025. The results show that the principles of reconstructionism such as orientation toward social transformation, strengthening humanitarian values, and active student participation in solving societal problems are in line with the spirit of curriculum reform in Indonesia, particularly in the Merdeka Curriculum. However, its implementation still faces challenges such as infrastructure gaps, educator readiness, and low digital literacy. It is concluded that reconstructionism can serve as a strong philosophical foundation for adaptive, contextual, and character-oriented curriculum reform, preparing Indonesians to face global challenges.

Keywords: *reconstructionism, philosophy of education, curriculum reform, globalization, Merdeka Curriculum*

ABSTRAK

Reformasi kurikulum di era globalisasi menuntut landasan filosofis yang mampu merespons dinamika sosial, kemajuan teknologi, dan tantangan moral secara holistik. Rekonstruksionisme, sebagai aliran filsafat pendidikan yang menempatkan pendidikan sebagai agen perubahan sosial, menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan

menganalisis konsep rekonstruksionisme sebagai landasan filosofis reformasi kurikulum di Indonesia serta implikasinya terhadap desain dan pengembangan kurikulum nasional. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui analisis tematik terhadap 22 literatur akademik dan 3 dokumen kebijakan kurikulum nasional dari rentang tahun 2018–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip rekonstruksionisme; seperti orientasi pada transformasi sosial, penguatan nilai-nilai kemanusiaan, dan partisipasi aktif peserta didik dalam memecahkan masalah masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi kurikulum di Indonesia, khususnya dalam Kurikulum Merdeka. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur, kesiapan pendidik, dan rendahnya literasi digital. Disimpulkan bahwa rekonstruksionisme dapat menjadi pijakan filosofis yang kuat untuk reformasi kurikulum yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter, kritis, dan siap menghadapi tantangan global.

Kata Kunci: rekonstruksionisme, filsafat pendidikan, reformasi kurikulum, globalisasi, Kurikulum Merdeka

A. Pendahuluan

Globalisasi dengan segala transformasinya telah berdampak pada sektor kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan (Thoyibah et al., 2025). Arus informasi yang cepat, kemajuan teknologi, serta interaksi lintas budaya menuntut sistem pendidikan untuk terus beradaptasi agar mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter moral yang kuat dan kesiapan menghadapi tantangan zaman (Mardhiyah et al., 2021). Dalam konteks Indonesia,

transformasi kurikulum telah berlangsung secara dinamis dari Kurikulum 1975 hingga Kurikulum Merdeka, namun kerap kali perubahan tersebut lebih bersifat teknis dan administratif tanpa disertai landasan filosofis yang kokoh dan eksplisit (Wulandari, 2022).

Pancasila sebagai dasar negara dan landasan filosofis pendidikan nasional seharusnya menjadi fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam setiap perumusan kurikulum (Winarno et al., 2026). Namun, kajian

menunjukkan bahwa integrasi Pancasila dalam kurikulum sering kali bersifat parsial dan normatif-moral, belum menyentuh dimensi filosofis yang lebih mendalam (Winarno et al., 2026). Di sisi lain, dunia pendidikan global diwarnai oleh berbagai aliran filsafat pendidikan, salah satunya adalah rekonstruksionisme, yang menekankan peran pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial dan pembentukan tatanan masyarakat yang lebih adil (Rohmat, 2019).

Rekonstruksionisme muncul sebagai respons terhadap krisis sosial dan budaya pada era modern. Aliran ini berpandangan bahwa pendidikan tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi harus mampu merekonstruksi tatanan sosial melalui pembentukan karakter, moralitas, dan kesadaran kritis peserta didik (Wahyuni, 2025). Dalam konteks Indonesia, semangat rekonstruksionisme sesungguhnya relevan dengan cita-cita pendidikan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003).

Meskipun kajian mengenai filosofi Kurikulum Merdeka telah banyak ditelaah dari perspektif progresivisme dan esensialisme (Winarno et al., 2026), analisis spesifik mengenai rekonstruksionisme sebagai landasan filosofis reformasi struktural kurikulum di era globalisasi masih sangat terbatas. Beberapa studi terdahulu, seperti Sutrisno et al. (2025) dan Al Iffah et al. (2023), menyinggung relevansi rekonstruksionisme dalam konteks pendidikan Islam, namun belum memetakan secara komprehensif implikasinya terhadap desain kurikulum nasional. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menganalisis prinsip-prinsip rekonstruksionisme dan relevansinya terhadap reformasi kurikulum di Indonesia secara menyeluruh.

Permasalahan yang muncul adalah: sejauh mana filsafat pendidikan rekonstruksionisme dapat menjadi landasan filosofis reformasi kurikulum di Indonesia di era globalisasi? Bagaimana implikasi

prinsip-prinsip rekonstruksionisme terhadap desain dan pengembangan kurikulum nasional? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui kajian pustaka terhadap literatur akademik dan dokumen kebijakan pendidikan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang melacak literatur melalui tiga pangkalan data utama, yakni Google Scholar, Portal Garuda, dan SINTA, dengan menggunakan kata kunci: rekonstruksionisme, reformasi kurikulum, dan globalisasi. Kriteria inklusi yang ditetapkan adalah: (1) artikel jurnal terakreditasi nasional (SINTA 1–4) atau jurnal internasional bereputasi; (2) dokumen resmi Kemendikbudristek; serta (3) karya ilmiah yang terbit pada rentang tahun 2018–2025. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 22 literatur akademik dan 3 dokumen kebijakan kurikulum nasional yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan menjelaskan fenomena

melalui deskripsi mendalam berbasis analisis tekstual. Analisis tematik dilakukan melalui tiga tahap sistematis: (1) reduksi data, yakni penyaringan dan pengelompokan sumber yang relevan; (2) kategorisasi tema, yaitu pengelompokan temuan ke dalam empat tema utama konsep dasar rekonstruksionisme, relevansi dengan Kurikulum Merdeka, implikasi desain kurikulum, dan tantangan implementasi; serta (3) penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis tematik lintas sumber. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan resmi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Dasar

Rekonstruksionisme dalam Filsafat Pendidikan

Rekonstruksionisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang lahir dari kritik terhadap progresivisme dan kondisi sosial-ekonomi yang stagnan di awal abad ke-20 dan memiliki pengaruh yang signifikan pada dunia pendidikan, terutama di Amerika Serikat. Aliran ini dipelopori oleh George Counts, Harold

Rugg, dan Theodore Brameld pada tahun 1930. Mereka terinspirasi oleh pemikiran John Dewey namun mengembangkan visi yang lebih radikal: pendidikan harus menjadi instrumen rekonstruksi sosial untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Secara etimologis, "rekonstruksionisme" berasal dari kata *reconstruct* yang berarti menyusun atau membangun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme berusaha mereformasi tatanan pendidikan yang ada dan membangun pola kehidupan kebudayaan yang mampu menjawab permasalahan dunia modern. Aliran ini berpandangan bahwa krisis kebudayaan modern seperti ketidakadilan sosial, degradasi moral, dan kerusakan lingkungan dapat diatasi melalui pendidikan yang membentuk karakter, moralitas, dan budaya baru yang lebih humanis.

Prinsip-prinsip utama rekonstruksionisme meliputi: (1) pendidikan sebagai agen perubahan masyarakat agar terciptanya lingkungan sosial yang baik; (2) kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan

masyarakat; (3) partisipasi aktif peserta didik dalam memecahkan masalah sosial; (4) penguatan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi; serta (5) guru sebagai fasilitator dan agen perubahan (Al Iffah et al., 2023; Sutrisno et al., 2025).

2. Relevansi Rekonstruksionisme dengan Reformasi Kurikulum di Indonesia

Reformasi kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase, dari Kurikulum 1975 hingga Kurikulum Merdeka. Setiap perubahan kurikulum membawa semangat pembaharuan, namun sering kali tidak disertai landasan filosofis yang eksplisit dan sistematis (Wulandari, 2022). Kurikulum 2013, misalnya, didominasi oleh filsafat progresivisme dan esensialisme, dengan integrasi Pancasila yang bersifat parsial dan terbatas pada tiga sila pertama secara normatif-moral (Winarno et al., 2026).

Kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada 2022 menandai babak baru dalam reformasi pendidikan Indonesia. Kurikulum ini menekankan otonomi satuan pendidikan, diferensiasi pembelajaran, dan pengarusutamaan

"Profil Pelajar Pancasila" sebagai tujuan sentral pendidikan nasional (Kemendikbudristek, 2024). Filosofi Kurikulum Merdeka secara eksplisit mengadopsi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang "manusia merdeka" serta nilai-nilai yang diajarkan oleh K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asy'ari, dan Romo Y.B. Mangunwijaya yang menekankan pendidikan sebagai alat pembebasan, pembentukan karakter, dan transformasi sosial (Permendikbudristek No. 12/2024).

Jika ditelaah lebih lanjut, semangat Kurikulum Merdeka memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip rekonstruksionisme. Pertama, keduanya menempatkan pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial, bukan sekadar transfer pengetahuan. Kedua, keduanya menekankan pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama pendidikan. Ketiga, keduanya mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam memecahkan masalah nyata di masyarakat melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) (Marif et al., 2025).

3. Implikasi Rekonstruksionisme terhadap Desain Kurikulum

Penerapan filsafat rekonstruksionisme dalam desain kurikulum memiliki beberapa implikasi praktis:

a. Orientasi Kurikulum pada Transformasi Sosial

Kurikulum tidak hanya dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan akademik, tetapi juga untuk membentuk kesadaran kritis terhadap permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini tercermin dalam muatan "Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila" (P5) yang mengajak peserta didik untuk terlibat langsung dalam isu-isu nyata di masyarakat (Kemendikbudristek, 2024). Sebagai ilustrasi konkret, sejumlah sekolah penggerak telah mengimplementasikan proyek berbasis komunitas, seperti pengelolaan sampah digital di perkotaan dan digitalisasi produk UMKM lokal yang melibatkan peserta didik secara aktif sebagai agen perubahan sosial.

b. Kurikulum yang Fleksibel dan Kontekstual

Rekonstruksionisme menuntut kurikulum yang adaptif terhadap perubahan zaman dan konteks lokal. Prinsip ini sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang memberikan otonomi kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing (Lazwardi et al., 2025).

c. Penguatan Peran Guru sebagai Agen Perubahan

Dalam perspektif rekonstruksionisme, guru bukan sekadar penyampai materi, melainkan fasilitator yang membimbing peserta didik untuk berpikir kritis, reflektif, dan solutif terhadap permasalahan sosial. Guru juga dituntut untuk menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Mubin, 2018; Sutrisno et al., 2025).

d. Integrasi Nilai-Nilai Pancasila secara Holistik

Rekonstruksionisme mendorong integrasi nilai-nilai dasar negara secara menyeluruh dalam kurikulum, tidak hanya pada aspek normatif-moral tetapi juga pada

dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kurikulum Merdeka mulai mengarah pada integrasi Pancasila yang lebih holistik melalui delapan dimensi Profil Pelajar Pancasila (Winarno et al., 2026).

4. Tantangan Implementasi Rekonstruksionisme dalam Kurikulum Nasional

Meskipun prinsip-prinsip rekonstruksionisme relevan dengan semangat reformasi kurikulum di Indonesia, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan:

a. Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Teknologi

Transformasi digital dalam pendidikan yang mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka masih menghadapi kendala serius, terutama di wilayah terpencil yang belum memiliki infrastruktur memadai. Keterbatasan jaringan internet, akses perangkat, serta dukungan listrik membuat penerapan pembelajaran digital belum berjalan merata. Data menunjukkan bahwa di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), lebih dari 40% sekolah belum memiliki akses internet yang stabil, dan hal ini turut membatasi keterlibatan aktif peserta didik dalam kegiatan

pembelajaran berbasis proyek (Sinambela et al., 2024).

b. Kesiapan dan Kompetensi Pendidik

Perubahan paradigma dari guru sebagai pusat pembelajaran (teacher-centered) menjadi fasilitator (student-centered) memerlukan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Namun, dalam praktiknya masih banyak guru yang mengalami kendala dalam menjalankan peran tersebut, seperti minimnya pelatihan, terbatasnya akses teknologi, dan masih kuatnya pola pikir tradisional. Sekitar 30% guru di daerah 3T belum mengakses pelatihan digital secara memadai, sehingga berpotensi tertinggal dan kurang optimal dalam menjalankan profesinya (Eneng et al., 2024; Sinambela et al., 2024).

c. Konsistensi Kebijakan Pendidikan

Seringnya perubahan kurikulum di Indonesia dapat menimbulkan kebingungan di kalangan guru serta mengganggu konsistensi pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, reformasi kurikulum memerlukan dukungan kebijakan yang stabil, penguatan kapasitas guru, dan

keselarasan antara perumusan kebijakan dengan kondisi nyata di sekolah agar implementasinya tidak hanya berubah di atas kertas, tetapi juga efektif di lapangan (Wulandari, 2022; Bunyamin & Handoyo, 2025).

d. Rendahnya Literasi Digital dan Etika Teknologi

Era globalisasi menuntut peserta didik memiliki literasi digital dan etika dalam menggunakan teknologi, tetapi penguatan kedua kompetensi ini belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dalam kurikulum. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa literasi digital dalam Kurikulum Merdeka masih perlu diperkuat melalui pembelajaran yang lebih terstruktur, penguatan peran

guru, dan integrasi etika digital sebagai bagian dari pendidikan karakter (Zaqla & Sunarni, 2024; Subhan, 2023; Lupita, 2025).

5. Rekonstruksionisme dan Pembentukan Karakter di Era Globalisasi

Globalisasi membawa dampak ganda terhadap sistem pendidikan. Di satu sisi, memberikan akses terhadap informasi dan kesempatan untuk kolaborasi lintas budaya. Namun di

sisi lain, juga membawa tantangan berupa penurunan moral, konsumerisme, dan krisis identitas budaya (Al Iffah et al., 2023). Rekonstruksionisme menawarkan solusi dengan menempatkan pembentukan karakter dan moralitas sebagai inti pendidikan.

Menurut rekonstruksionisme, proses dan lembaga pendidikan wajib memperbaiki struktur yang sudah ada dan membangun struktur kehidupan baru yang berdasarkan pada budaya, karakter, dan moralitas. Dalam perspektif rekonstruksionisme, pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan nilai-nilai moral secara kaku, tetapi juga mendorong peserta didik supaya berpikir kritis dalam mengevaluasi sistem sosial yang ada dan berkontribusi dalam pembentukan masyarakat yang lebih adil dan bermoral (Sutrisno et al., 2025). Pendekatan ini relevan dengan semangat Profil Pelajar Pancasila yang menekankan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif (Kemendikbudristek, 2024).

6. Sintesis: Tabel Sinkronisasi Rekonstruksionisme dan Kurikulum Merdeka

Berdasarkan analisis di atas, tabel berikut memetakan secara operasional kesesuaian prinsip-prinsip rekonstruksionisme dengan implementasi Kurikulum Merdeka, beserta kendala riil dan langkah solutifnya:

Prinsip Rekonstruksionisme	Implementasi di Kurikulum Merdeka	Kendala Riil Lapangan	Langkah Solutif
Pendidikan sebagai agen perubahan sosial	Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) melibatkan peserta didik dalam isu nyata	Minimnya proyek sosial berbasis digital di daerah 3T; akses internet terbatas	Perluasan program internetwork desa; pelatihan guru fasilitator proyek sosial
Kurikulum relevan kebutuhan dan tantangan	Otonomi satuan pendidikan mengembangkan	Kapasitas sekolah tidak merata;	Penguatan MGMP daerah dan penda

Prinsip Rekonstruksionisme	Implementasi di Kurikulum Merdeka	Kendala Riil Lapangan	Langkah Solutif
masyarakat	kurikulum sesuai konteks lokal (Lazwardi et al., 2025)	standar mutu berbeda antar daerah	mpingannya intensif dari pemerintah
Partisipasi aktif peserta didik memecahkan masalah sosial	Project-based learning dan pembelajaran berdiferensiasi (Marif et al., 2025)	Guru belum terlatih membimbing PBL; waktu pembelajaran tersita ujian	Revisi proporsitas jam PBL; pelatihan intensif guru fasilitator
Penguatan nilai kemanusiaan, keadilan, demokrasi	Dimensi Profil Pelajar Pancasila : Beriman, Berkebinekaan Global, Bergotong Royong	Implementasi masih normatif; belum menyentuh dimensi ontologis-	Integrasi nilai-nilai secara holistik dalam semua mata pelajaran, bukan hanya PPKn

Prinsip Rekonstruksionisme	Implementasi di Kurikulum Merdeka	Kendala Riil Lapangan	Langkah Solutif
		aksiologis	
Guru sebagai fasilitator dan agen perubahan	Program Guru Penggerak dan Platform Merdeka Mengajar (Kemendikbudristek, 2024)	Sekitar 30% guru di daerah 3T belum mengakses pelatihan digital (Sina mbela et al., 2024)	Pelatihan daring berjenjang + mentor ing sejawat; insentif guru daerah terpencil

Berdasarkan tabel di atas, dapat disintesis bahwa rekonstruksionisme menawarkan kerangka filosofis yang kuat untuk reformasi kurikulum di Indonesia di era globalisasi. Agar rekonstruksionisme dapat menjadi landasan filosofis yang efektif, diperlukan langkah-langkah strategis: (1) perumusan landasan filosofis kurikulum secara eksplisit dan sistematis; (2) pelatihan dan

pendampingan guru yang memadai; (3) pemerataan infrastruktur pendidikan; (4) pengembangan kurikulum yang fleksibel dan kontekstual; serta (5) penguatan literasi digital dan etika teknologi bagi peserta didik dan pendidik.

D. Kesimpulan

Rekonstruksionisme sebagai aliran filsafat pendidikan menawarkan landasan konseptual yang relevan untuk reformasi kurikulum di Indonesia di era globalisasi. Prinsip-prinsip rekonstruksionisme yang menekankan pendidikan sebagai agen perubahan sosial, pembentukan karakter, dan partisipasi aktif peserta didik sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka dan cita-cita pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka, dengan Profil Pelajar Pancasila sebagai tujuan sentralnya, mulai mengadopsi pendekatan holistik yang menyentuh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis pendidikan nasional.

Meskipun demikian, implementasi rekonstruksionisme dalam kurikulum nasional masih terhambat oleh kesenjangan infrastruktur digital, khususnya di

daerah 3T rendahnya kesiapan pendidik dalam menjalankan peran sebagai fasilitator, inkonsistensi kebijakan kurikulum, serta lemahnya integrasi literasi digital dalam sistem pembelajaran. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk menjadikan rekonstruksionisme sebagai pijakan filosofis yang kuat dalam mencetak generasi Indonesia yang berkarakter, kritis, dan siap menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Iffah, A., At-Tammy, M. N., Fatmawati, W., & Sari, H. P. (2023). Pendidikan Islam Berbasis Rekonstruksi di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tuntas*, 1(4), 269–276.
- Dewi, Z. R., & Sunarni, S. (2024). Peran literasi digital dalam implementasi Kurikulum Merdeka: Adaptasi dan transformasi di era digital. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 4(1), 9–14. <https://doi.org/10.30872/jimpia.n.v4i1.2916>
- Handoyo, E., & Rokhman, F. (2025). Reformasi kurikulum dalam konteks desentralisasi: Analisis

- kritis terhadap tiga studi terkait.
Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(02), 256–266.
- Kemendikbudristek. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Merdeka. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Lazwardi, D., Kawijaya, R., & Cromico, A. (2025). Kurikulum dan Konteks Lokal: Studi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 13(1), 88–102.
- Lupita, R. A. (2025). Konsep Literasi Digital dalam Kurikulum Merdeka Belajar pada Era Disrupsi di Sekolah Dasar: Kajian Buku 'Literasi Digital dalam Dunia Pendidikan di Abad ke-21' Karya Daniel Ginting. *EL-Hadhary: Jurnal Penelitian Pendidikan Multidisiplin*, 3(02), 96–115.
- Mardhiyah, R. H., et al. (2021). Pentingnya Keterampilan Abad 21 dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(3), 120–130.
- <https://doi.org/10.31849/lectura.v12i1.5813>
- Marif, H., Al Mu'allif, M. B., Nafis, A., Makmun, S., & Ahid, N. (2025). Desain dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah: Kajian Teoritis dan Konseptual di Era Digital. *Paedagogos Journal of Education and Learning*, 1(2), 67–81.
- <https://doi.org/10.64131/paedagogos.v1i2.32>
- Mardiana, E., Kusuma, Z. N. A. W., & Iskandar, S. (2024). Karakteristik dan Peran Guru sebagai Fasilitator Pembelajaran Abad 21 di Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4), 247–256.
- Mubin, A. (2018). Rekonstruksionisme dan Peran Guru dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 112–125.
- <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.681>
- Rohmat. (2019). Kurikulum dalam Tinjauan Filsafat Rekonstruksionisme. *Insania*, 24(2), 247–260.

<https://doi.org/10.24090/insani.a.v24i2.3078>

Sinambela, S. M., Lumbantobing, J. N. Y., Saragih, M. D., Mangunsong, A. F., Nisa, C., Simanjuntak, J. P., & Jamaludin, J. (2024). Kesenjangan digital dalam dunia pendidikan masa kini dan masa yang akan datang: Studi kasus di SMP N 35 Medan. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 15–24.
<https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3003>

Subhan, A. (2023). Etika Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3723–3730.
<https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2693>

Sutrisno, G. A., Marati, S. N., & Sari, H. P. (2025). Pemikiran Filsafat Pendidikan Rekonstruksionisme: Implikasi terhadap Pendidikan Karakter dan Pendidikan Moral. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 132–143.

<https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.870>

Thoyibah, Z., et al. (2025). Dampak Globalisasi terhadap Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(1), 12–28.

Wahyuni, M. T., Rodhiah, R. T. A., & Fahillah, M. (2025). Strategi Peningkatan Keterampilan Abad ke-21 Siswa SD dengan Memanfaatkan Aliran Filsafat Rekonstruksionisme. *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)*, 7(2), 88–103.

Winarno, Santoso, H., Kardiman, Y., & Muchtarom. (2026). Filsafat Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka: Analisis Komparatif Landasan Filosofis. *Integralistik*, 37(1), 42–60.

Wulandari, S. (2022). Tantangan Implementasi Kurikulum di Indonesia: Perspektif Pendidik. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 8(2), 77–90.

Wulandari, T. R. (2022). Analisis frekuensi perubahan kurikulum terhadap konsistensi pendidikan. *Joies (Journal of*

Islamic Education Studies),
7(2), 217–242.

Zaia, A., & Sunarni, S. (2024). Peran literasi digital dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan, 4(1), 9–14.
<https://doi.org/10.30872/jimpia.n.v4i1.2916>